

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

---

***DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BONE***



**2021**



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan  
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

## **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.



#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48**



Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone diharapkan mampu menghadapi perubahan dasar yang akan terjadi di Kabupaten Bone dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

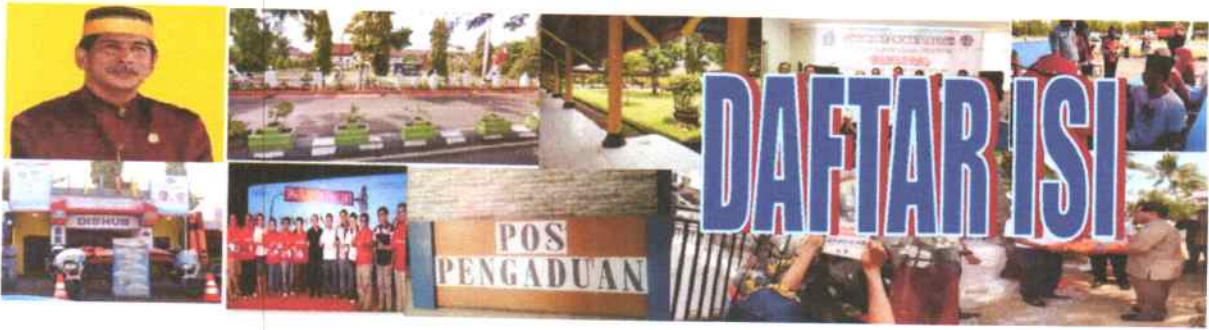
Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Watampone,      September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BONE**



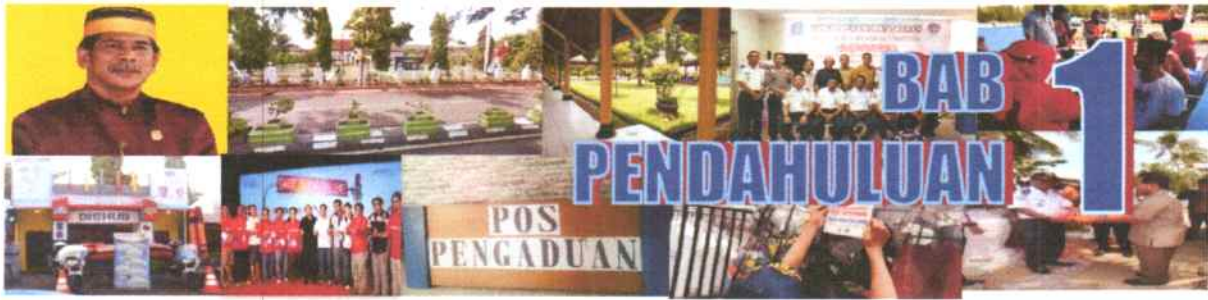
**Drs. ANDI DARMAWAN**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19621212 198503 1 027



HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	28
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan .....	28
3.3. Program dan Kegiatan .....	29
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V. PENUTUP .....	39





### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone bidang Perhubungan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Daerah, yang bertanggung jawab kepada bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan.

### 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
24. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Nomor       Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2022 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program- program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2022 ;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang perlunya Renja PD, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja PD.

**BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah; analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan; isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Perhubungan; review terhadap rancangan awal RKPD; penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, yang mengemukakan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; tujuan dan sasaran renja perangkat daerah; program dan kegiatan.

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, pada bab ini dipaparkan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

**BAB V Penutup**, menjelaskan kesimpulan dari rencana kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2022.





## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 terdapat dua puluh dua (23) sub kegiatan dari sembilan (9) kegiatan dan dua (2) program yang menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dinas :

**“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.**

Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya penyusunan rencana perangkat daerah sebanyak 2 dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 12.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (keadaan bulan Agustus) atau 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-.

### 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya penyusunan rencana perangkat daerah sebanyak 2 dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 25.200.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- (keadaan bulan Agustus) atau 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-.

### 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya penyusunan rencana perangkat daerah sebanyak 2 dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (keadaan bulan Agustus) atau 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-.



4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran lancarnya proses penyusunan rencana perangkat daerah. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 12.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (keadaan bulan Agustus) atau 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 25.200.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- (keadaan bulan Agustus) atau 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.600.000,-.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Sub Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka terealisasinya jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.930.740.575,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.390.400.926,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 60,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.540.339.649,-.

7. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini merupakan pendukung dalam rangka peningkatan pelaporan dokumen laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (keadaan bulan Agustus ) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-.

8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Dalam rangka meningkatkan peningkatan pelaporan dokumen laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, maka pada tahun 2021 sub kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 39.600.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- (keadaan bulan Agustus ) atau 66,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.200.000,-.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 49.698.728,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 41.288.909,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 83,07% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.409.819,-.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 594.643.600,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 389.629.600,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 65,52% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 205.014.000,-.

11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 14.450.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.352.200,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 99,32% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 97.800,-.

12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 12.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 74,16% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.100.000,-.

13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 470.848.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 183.719.965,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 39,01% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 287.128.035,-.

14. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran tersedianya meja dan kursi kerja pejabat. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 6.100.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 6.100.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%



15. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 69.005.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 69.005.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 35.770.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 17.915.179,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 50,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.854.821,-.

17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib administrasi dan kesejahteraan aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.288.008.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 839.886.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 65,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 448.122.000,-.

18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran kendaraan dinas yang layak pakai. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 247.502.941,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 172.893.721,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 69,85% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 74.609.220,-.

19. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran peralatan elektronik yang layak pakai. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.410.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.720.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 50,43% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.690.000,-.

20. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran gedung kantor yang layak pakai. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 5.013.731,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 5.013.731,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

21. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan traffic light di wilayah Kabupaten Bone. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

22. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan pengelolaan PAD dan mengoptimalkan pemeliharaan terminal Tipe C. Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 50.250.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 50.250.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

23. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (keadaan bulan Agustus) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 83,33% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.



Secara keseluruhan belanja langsung dari anggaran yang telah ditetapkan di DPPA-PD adalah Rp. 6.993.440.575,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 4.355.075.231,- atau 37,72%, sisa dana sebesar Rp. 2.638.365.344,- dengan rincian sebagai berikut :

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Belanja Pegawai       | : Rp. 2.390.400.926,- terealisasi |
| Dana sebesar sesuai DPPA | : Rp. 3.930.740.575,-             |
| Selisih sebesar          | : Rp. 1.540.339.649,-             |
| b. Belanja Langsung      | : Rp. 1.964.674.305,- terealisasi |
| Dana sebesar             | : Rp. 3.062.700.000,-             |
| Sisa anggaran sebesar    | : Rp. 1.098.025.695,-             |

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kab. Bone

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (keadaan bulan Agustus)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100	Rp 122.367.300	Rp 53.600.000	Rp 995.655.857	Rp 995.655.857	Rp 995.655.857	Rp 2.044.911.714	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	2	Rp 14.520.000	Rp 8.000.000	Rp 12.103.257	Rp 12.103.257	100%	Rp 12.103.257	Rp 32.206.514 222%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	2	Rp 30.492.000	Rp 16.800.000	Rp 524.650.000	Rp 524.650.000	100%	Rp 524.650.000	Rp 1.066.100.000 3496%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	2	Rp 14.520.000	Rp 4.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.000.000	Rp 24.000.000 165%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	12	Rp 14.520.000	Rp 8.000.000	Rp 314.103.600	Rp 314.103.600	100%	Rp 314.103.600	Rp 636.207.200 4382%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	6	Rp 48.315.300	Rp 16.800.000	Rp 134.799.000	Rp 134.799.000	100%	Rp 134.799.000	Rp 286.398.000 593%

Page 12



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (keadaan bulan Agustus)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100	Rp 1.452.586.126	8	Rp 637.890.674	Rp 1.513.230.321	Rp 1.513.230.321		Rp 1.513.230.321	Rp 3.664.351.316	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	Rp 75.478.590	8	Rp 41.288.909	Rp 354.120.492	Rp 354.120.492	100%	Rp 354.120.492	Rp 749.529.893	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	Rp 57.862.700	8	Rp 14.352.200	Rp 198.230.500	Rp 198.230.500	100%	Rp 198.230.500	Rp 410.813.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	12	Rp 719.518.756	8	Rp 389.629.600	Rp 150.004.300	Rp 150.004.300	100%	Rp 150.004.300	Rp 689.638.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	24	Rp 30.000.000	16	Rp 8.900.000	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000	100%	Rp 22.000.000	Rp 52.900.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	384	Rp 569.726.080	235	Rp 183.719.965	Rp 788.875.029	Rp 788.875.029	100%	Rp 788.875.029	Rp 1.761.470.023	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outccmes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (keadaan bulan Agustus)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 1.601.771.380	0,00%	Rp 857.801.179	Rp 1.019.936.897	Rp 1.019.936.897	100%	Rp 1.019.936.897	Rp 2.897.674.973	181%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon dan software maintance sesuai rencana kebutuhan	36	Rp 43.281.700	24	Rp 17.915.179	Rp 31.596.897	Rp 31.596.897	100%	Rp 31.596.897	Rp 81.108.973	187%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	184	Rp 1.558.489.680	184	Rp 839.886.000	Rp 988.340.000	Rp 988.340.000	100%	Rp 988.340.000	Rp 2.816.566.000	181%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 772.119.150	100	Rp 75.105.000	Rp 555.803.000	Rp 555.803.000	100%	Rp 555.803.000	Rp 1.186.711.000	154%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	4	Rp 616.000.000		Rp -	Rp 206.038.000	Rp 206.038.000	100%	Rp 206.038.000	Rp 412.076.000	67%
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2	Rp 46.119.150	2	Rp 6.100.000	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	100%	Rp 31.500.000	Rp 69.100.000	150%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2	Rp 110.000.000	2	Rp 69.005.000	Rp 318.265.000	Rp 318.265.000		Rp 318.265.000	Rp 705.535.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 390.423.000	100	Rp 179.627.434	Rp 336.598.442	Rp 336.598.442	100%	Rp 352.051.373	Rp 868.277.249	222%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	48	Rp 330.000.000	48	Rp 172.893.721	Rp 296.961.511	Rp 296.961.511	100%	Rp 296.961.511	Rp 766.816.743	232%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Rp 16.500.000	12	Rp 1.720.000	Rp 12.092.000	Rp 12.092.000	100%	Rp 27.544.931	Rp 41.356.931	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Rp 43.923.000	1	Rp 5.013.713	Rp 27.544.931	Rp 27.544.931	100%	Rp 27.544.931	Rp 60.103.575	137%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (keadaan bulan Agustus)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /	100	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	1	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan	100	Rp 2.175.000.000	Rp 30.000.000	Rp -		Rp -	Rp 30.000.000	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah pembangunan halte	2	Rp 280.000.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah sarana perlengkapan jalan yang tersedia	1	Rp 1.650.000.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan	38	Rp 245.000.000	Rp 30.000.000	Rp -		Rp -	Rp 30.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	Rp 1.719.615.000	0,00% Rp 50.250.000	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp 50.250.000	3%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang tersedia serta masyarakat dan pengendara yang terlayani	12	Rp 1.719.615.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara		Rp -	Rp 50.250.000	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp 50.250.000	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (keadaan bulan Agustus)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Rp 506.727.232	Rp 50.000.000	Rp 321.389.500	Rp 321.389.500		Rp 321.389.500	Rp 692.779.000	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen registrasi kendaraan wajib uji	1	Rp 42.823.000	Rp -	Rp 55.600.000	Rp 55.600.000	100%	Rp 55.600.000	Rp 111.200.000	260%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1	Rp 275.000.000	Rp -	Rp 50.314.500	Rp 50.314.500	100%	Rp 50.314.500	Rp 100.629.000	37%
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor	1	Rp 52.488.700	Rp -	Rp 62.237.500	Rp 62.237.500	100%	Rp 62.237.500	Rp 124.475.000	237%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sesuai rencana	1	Rp 86.030.032	1 Rp 50.000.000	Rp 82.450.000	Rp 82.450.000	100%	Rp 82.450.000	Rp 214.900.000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Rp 50.385.500	Rp -	Rp 70.787.500	Rp 70.787.500	100%	Rp 70.787.500	Rp 141.575.000	281%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	100	Rp 1.549.955.000	Rp -	Rp 77.000.000	Rp 77.000.000	100%	Rp 77.000.000	Rp 154.000.000	10%
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah reviter, alat komunikasi Handy Talky, zona selamat sekolah, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail,cermin tikungan	1	Rp 1.549.955.000	Rp -	Rp 77.000.000	Rp 77.000.000	100%	Rp 77.000.000	Rp 154.000.000	10%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (keadaan bulan Agustus)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	Rp 297.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang terlatih	2	Rp 55.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah keselamatan angkutan mobil penumpang / barang yang meningkat	8	Rp 88.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kabupaten / Kota	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang memenuhi syarat pemenuhan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	6	Rp 66.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah sistem keselamatan perusahaan angkutan umum yang terbentuk	1	Rp 88.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100	Rp 357.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau yang tersedia		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan sungai dan danau terpelihara	3	Rp 330.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemasukan PAD di bidang Pelabuhan sungai dan danau yang optimal	12	Rp 27.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	100	Rp 177.156.100	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan uji coba	2	Rp 177.156.100	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						Rp 4.831.706.017	Rp 4.831.706.017		Rp 4.862.611.879	Rp 14.051.113.109	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

SASARAN	INDIKATOR	2020		% CAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Predikat evaluasi SAKIP dalam APIP	B	B	100
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:80	1:80	100
	Rasio Ijin Trayek	0,0015	0,0054	3,6
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	50	-	-
	Persentase Pelayanan Angkutan	70	50	71,42
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.991	3.815	182,40
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	70	70	100

b. Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Tahun 2020 (Rp.)		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik
Sasaran 1 :				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan.				
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.660.801.592	1.644.411.361	99,01% 100%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.720.000	19.493.640	98,85% 100%
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	552.690.000	536.590.000	97,09% 100%
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12.000.000	12.000.000	100% 100%
4.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	474.800.000	474.771.429	99,99% 100%
5.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	601.591.592	601.556.292	99,98% 100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	609.484.408	604.960.656	99,26% 100%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	206.038.000	206.038.000	100% 100%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	208.265.000	208.265.000	100% 100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.546.500	7.546.500	100% 100%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	182.542.000	178.019.156	97,52% 100%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.092.908	5.092.000	99,98% 100%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.750.000	47.750.000	100% 100%
1.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	47.750.000	47.750.000	100% 100%

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Tahun 2020 (Rp.)		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik
IV.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>100%</b> <b>100%</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.000.000	36.000.000	100% 100%
V.	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>89.200.000</b>	<b>89.200.000</b>	<b>100%</b> <b>100%</b>
1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	48.000.000	48.000.000	100% 100%
2.	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	41.200.000	41.200.000	100% 100%
<b>Sasaran 2 :</b>				
<i>Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan.</i>				
<b>Sasaran 3 :</b>				
<i>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.</i>				
VI.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>141.205.000</b>	<b>140.855.000</b>	<b>99,75%</b> <b>100%</b>
1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	131.205.000	130.855.500	99,73% 100%
2.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	10.000.000	10.000.000	100% 100%
VII.	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>79.420.000</b>	<b>79.420.000</b>	<b>100%</b> <b>100%</b>
1.	Pengadaan APILL	79.420.000	79.420.000	100% 100%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.057.500.000</b>	<b>1.866.946.543</b>	<b>90,59%</b> <b>100%</b>



c. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020	
			Rp	%
1.	Kinerja Anggaran	2.663.861.000	2.642.597.517	99,20
2.	Kinerja Pendapatan Perangkat Daerah	1.300.000.000	1.634.250.000	125,71

**Tabel T-C.30.**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021 (Keadaan Agustus)	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase layanan angkutan umum			80%	80%	90%	50%	50%	90%	90%	
2.	Rasio ijin trayek			0,0020%	0,0005	0,0004	0,0054		0,0004	0,0002	
3.	Pemasangan rambu-rambu			50 Unit	50 Unit	50 Unit	-		50	50	
4.	Jumlah uji kir angkutan umum			1.991 Buah	2.190 Buah	2.409 Buah	3.815 Buah		2.409	11.049	
5.	Persentase kepemilikan kir angkutan umum			80%	80%	90%	70%		90	100	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas**

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kab. Bone memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

#### **a. Kekuatan**

1. Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan transportasi;
2. Adanya Sumber Daya Manusia yang potensial;
3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik;
4. Sarana dan prasarana operasional pelayanan yang dimiliki;
5. Jaringan trayek yang memadai.

#### **b. Kelemahan**

1. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin. Kurangnya pegawai yang pernah mengikuti diklat PPNS, pengujian kendaraan dan manajemen lalulintas perkotaan.
2. Pendistribusian tugas tidak merata
3. Tidak memahami tupoksi
4. Kurang lengkapnya Data Base data yang akurat, informatif dan aktual
5. Kurangnya perlengkapan jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kab. Bone memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

#### **a. Peluang**

1. Adanya perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah di bidang LLAJ;
2. Rencana pembangunan bandara dan pengembangan wilayah pasca operasional bandara;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi;
4. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah;
5. Jaringan trayek yang memadai.

#### **b. Tantangan**

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas;
2. Presentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada;
3. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan munculnya angkutan online;
4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya;



5. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum.

Berdasarkan analisis terhadap perubahan lingkungan internal dan perubahan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas di atas. Maka, dirumuskan beberapa isu-isu penting sebagai berikut :

**Eksternal:**

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya kinerja jaringan jalan;
3. Belum optimalnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
4. Belum optimalnya *Modal Share* karena belum optimalnya angkutan umum massal dan angkutan umum;
5. Masih rendahnya tingkat rata-rata kecepatan lalu lintas karena masih banyaknya titik/simpul kemacetan;
6. Tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi;

**Internal:**

1. Nilai evaluasi kinerja yang belum memadai;
2. Anggaran dan sarpras yang belum memadai.

## **2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik dalam rangka menunjang program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kab. Bone agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap organisasi perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan sebagai berikut :

### ***PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN :***

1. - Pengadaan Guard Rill (pengaman jalan) diusulkan oleh Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng, Desa Ureng dan Desa Siame Kecamatan Palakka, Desa Samaenre Kecamatan Tellu LimpoE, Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe, Desa Bacu Kecamatan Barebbo, dan Kelurahan Kahu Kecamatan Bonto Cani, dan Desa Jaling Kecamatan Awangpone;
- Pengadaan Marka Jalan diusulkan oleh Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale, Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja;
- Pengadaan Cermin Tikungan oleh Desa Samaenre Kecamatan Tellu LimpoE, Desa Opo, Desa Pacciro Desa dan Timurung Kecamatan Ajangale, Desa Bulu Alapporenge, Desa Selli Kecamatan Bengo, Desa Amali Riattang Kecamatan Amali, Desa Salebba Kecamatan Ponre, Desa Panyili Kecamatan Palakka, Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kelurahan Kahu Kecamatan Kahu, Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare, Desa Polewali Kecamatan Libureng, Desa Cakkabone Kecamatan Awangpone, Desa Matampa Bulu Kecamatan Lamuru, Desa Langi Kecamatan Bontocani, Desa Matuju Kecamatan Awangpone;
- Pengadaan Rambu Lalu Lintas oleh Desa Lampoko, Desa Parippung Kecamatan Barebbo, Desa Benteng Tellue, Desa Ulo, Kelurahan Pompanua Riattang, Desa Labissa dan Desa Timurung Kecamatan Ajangale, Desa Salebba dan Desa Poleonro Kecamatan Ponre, Desa Tappale dan Desa Polewali Kecamatan Libureng, Desa Wackecce Kecamatan Lappariaja, Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur, Desa Cenrana Kecamatan Cenrana, dan Desa Matampa Bulu Kecamatan Lamuru; dan
- Pengadaan Deliniator oleh Desa Bulu Alapporenge Kecamatan Bengo.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kab. Bone

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
	- Pengadaan Guard Rail	Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng	- Guard Rail	200 Meter	
		Desa Ureng Kecamatan Palakka		100 Meter	
		Desa Siame Kecamatan Palakka		200 Meter	
		Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe		100 Meter	
		Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe		200 Meter	
		Desa Bacu Kecamatan Barebbo		50 Meter	
		Kelurahan Kahu Kecamatan Bonto Cani		200 Meter	
		Desa Jaling Kecamatan Awangpone		50 Meter	
	- Pengadaan Marka Jalan	Kelurahan Pompanua Riattang	- Marka Jalan	5 Unit	
		Kecamatan Ajangale			
		Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja		2 Paket	
	- Pengadaan Cermin Tikungan	Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe	- Cermin Tikungan	1 Unit	
		Desa Opo Kecamatan Ajangale		1 Unit	
		Desa Pacciro Kecamatan Ajangale		1 Unit	
		Desa Timurung Kecamatan Ajangale		3 Unit	
		Desa Bulu Alapporenge Kecamatan Bengo		1 Unit	
		Desa Selli Kecamatan Bengo		1 Unit	
		Desa Amali Riattang Kecamatan Amali		1 Unit	
		Desa Salebba Kecamatan Ponre		1 Unit	
		Desa Panyili Kecamatan Palakka		1 Unit	



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pengadaan Cermin Tikungan	Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur	- Cermin Tikungan	2 Unit	
		Kelurahan Kahu Kecamatan Kahu		5 Unit	
		Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare		1 Unit	
		Desa Polewali Kecamatan Libureng		1 Unit	
		Desa CakkaBone Kecamatan Awangpone		1 Unit	
		Desa Matampa Bulu Kecamatan Lamuru		2 Unit	
		Desa Langi Kecamatan Bontocani		5 Unit	
		Desa Matuju Kecamatan Awangpone		1 Unit	
	- Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Desa Lampoko Kecamatan Barebbo	-Rambu-rambu Lalu Lintas	3 Unit	
		Desa Parippung Kecamatan Barebbo		5 Unit	
		Desa Benteng Tellue Kecamatan Ajangale		2 Unit	
		Desa Ulo Kecamatan Ajangale		3 Unit	
		Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale		1 Unit	
		Desa Labissa Kecamatan Ajangale		3 Unit	
		Desa Timurung Kecamatan Ajangale		3 Unit	
		Desa Salebba Kecamatan Ponre		2 Unit	
		Desa Poleonro Kecamatan Ponre		2 Unit	
		Desa Tappale Kecamatan Libureng		2 Unit	
		Desa Polewali Kecamatan Libureng		2 Unit	
		Desa Waekecce Kecamatan Lappariaja		3 Unit	
		Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur		2 Unit	
		Desa Cenrana Kecamatan Cenrana		2 Unit	
		Desa Matampa Bulu Kecamatan Lamuru		8 Unit	
	- Pengadaan Deliniator	Desa Bulu Alapporenge Kecamatan Bengo	- Deliniator	100 Unit	



### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

#### Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Pembangunan Nasional di bidang perhubungan, pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengamanan melalui penyusunan standar pelayanan minimal guna untuk menjamin obsesi untuk pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Standar pelayanan minimal bidang perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

#### A. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan;
2. Mengembangkan insfratraktur dan aksebilitas jalan khususnya pada keselamatan dan kelengkapan jalan;
3. Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

#### B. Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan;
2. Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar dan aksebilitas jalan;
3. Meningkatnyaketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah tentang Retribusi, ketertiban Kendaraan Bermotor di kawasan wilayah Kabupaten Bone. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
- 4). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- 5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

##### **B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1). Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- 2). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3). Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

##### **D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;



- 2). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 3). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 5). Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 2). Pengadaan Mebel;
  - 3). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;;
  - 2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional;
  - 2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 3). Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- A. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota
- 1). Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota;
- B. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
- 1). Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota;
  - 2). Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota;
  - 3). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- C. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 1). Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
  - 2). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- D. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 1). Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - 2). Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - 3). Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor;

- 4). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - 5). Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- E. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
- 1). Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- F. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- 1). Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
  - 2). Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - 3). Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kabupaten / Kota;
  - 4). Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- G. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- 1). Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota;
- H. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- 1). Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
  - 2). Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau;
  - 3). Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.



Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dirumuskan sebagai berikut :



Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KAB. BONE**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PERHUBUNGAN</b>								
2.15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<i>Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			<b>4.064.163.041</b>				<b>4.323.365.412</b>
2.15 01 2.01	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan realisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran</b>		<b>100%</b>	<b>111.263.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>122.367.300</b>
2.15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	Rp 13.200.000	APBD		2 Dokumen	Rp 14.520.000
2.15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	Rp 27.740.000	APBD		2 Dokumen	Rp 30.492.000
2.15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	Rp 13.200.000	APBD		2 Dokumen	Rp 14.520.000
2.15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp 13.200.000	APBD		12 Bulan	Rp 14.520.000
2.15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	6 Dokumen	Rp 43.923.000	APBD		6 Dokumen	Rp 48.315.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan realisasi pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>65.560.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>72.116.000</b>
2.15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	.....	APBD	12 Bulan	.....
2.15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp 22.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp 24.200.000
2.15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	Rp 43.560.000	APBD	4 Dokumen	Rp 47.916.000
2.15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>56.068.375</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>61.775.212</b>
2.15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapat pakaian Olahraga sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	-	-		-	-
2.15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 orang	Rp 35.068.375	APBD	1 Orang	Rp 38.675.212
2.15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis / Non Formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 orang	Rp 21.000.000	APBD	5 Orang	Rp 23.100.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran</b>		<b>100%</b>	<b>1.318.260.166</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.302.793.370</b>
2.15	01	2.06	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	24 Bulan	Rp 25.000.000	APBD		24 Bulan	Rp 30.000.000
2.15	01	2.06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 Kali	Rp 517.932.800	APBD		30 Kali	Rp 569.726.080
2.15	01	2.06	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp 68.616.900	APBD		12 Bulan	Rp 75.478.590
2.15	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp 52.602.506	APBD		12 Bulan	Rp 57.862.700
2.15	01	2.06	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp 654.107.960	APBD		12 Bulan	Rp 569.726.000
2.15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>701.926.500</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>772.119.150</b>
2.15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 Unit	Rp 560.000.000	APBD		4 Unit	Rp 616.000.000
2.15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Paket	Rp 41.926.500	APBD		2 Paket	Rp 46.119.150
2.15	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Unit	Rp 100.000.000	APBD		2 Unit	Rp 110.000.000
2.15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>1.456.155.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.601.771.380</b>
2.15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon dan software maintance sesuai rencana	Kecamatan Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp 39.347.000	APBD		36 Paket	Rp 43.281.700
2.15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	184 Orang	Rp 1.416.808.000	APBD		184 Orang	Rp 1.558.489.680



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Cakupan Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>354.930.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>390.423.000</b>
2.15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Kecamatan Tanete Riattang Barat	45 Unit	Rp 300.000.000	APBD		48 Unit	Rp 330.000.000
2.15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD		12 Bulan	Rp 16.500.000
2.15 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp 39.930.000	APBD		1 Kegiatan	Rp 43.923.000
2.15 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>Persentase pemenuhan cakupan penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>			<b>7.175.412.120</b>	<b>APBD</b>			<b>6.792.953.332</b>
2.15 02 2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota</b>			<b>Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota</b>		<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
2.15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota			Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Kebijakan	50.000.000	APBD		1 Kebijakan	10.000.000
2.15 02 2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota</b>			<b>Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</b>		<b>100%</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2.175.000.000</b>
2.15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota			Jumlah pembangunan halte	Kabupaten Bone	2 buah	560.000.000	APBD		2 Buah	Rp 280.000.000
2.15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota			Jumlah sarana perlengkapan jalan yang tersedia	Kabupaten Bone	1 Paket	1.500.000.000	APBD		1 Paket	Rp 1.650.000.000
2.15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			Jumlah Prasarana Jalan	Kabupaten Bone	38 Titik	240.000.000	APBD		38 Titik	Rp 245.000.000
2.15 02 2.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>			<b>Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>		<b>100%</b>	<b>1.699.650.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.719.615.000</b>
2.15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			Jumlah sarana dan prasarana terminal yang tersedia serta masyarakat dan pengendara yang terlayani	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp 1.699.650.000	APBD		12 Bulan	Rp 1.719.615.000
2.15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Jumlah terminal yang terpelihara	Kecamatan Tanete Riattang Barat		Rp -	APBD			Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor		100%	460.661.120			100%	506.727.232
2.15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen registrasi kendaraan wajib uji	Kecamatan Palakka	1 Dokumen	Rp 38.930.000	APBD		1 Dokumen	Rp 42.823.000
2.15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Kecamatan Palakka	1 Dokumen	Rp 250.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 275.000.000
2.15 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor	Kecamatan Palakka	1 Dokumen	Rp 47.717.000	APBD		1 Dokumen	Rp 52.488.700
2.15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Palakka	1 Unit	Rp 78.209.120	APBD		1 Unit	Rp 86.030.032
2.15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Palakka	1 Kegiatan	Rp 45.805.000	APBD		1 Kegiatan	Rp 50.385.500
2.15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		100%	1.409.050.000			100%	1.549.955.000
2.15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah reviter, alat komunikasi Handy Talky, zca selamat sekolah, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail,cermin tikungan	Kabupaten Bone	1 Paket	Rp 1.409.050.000	APBD		1 Paket	Rp 1.549.955.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%	270.000.000			100%	297.000.000
2.15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang terlatih	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp 50.000.000	APBD		1 Kegiatan	Rp 55.000.000
2.15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah keselamatan angkutan mobil penumpang / barang yang meningkat	Kabupaten Bone	8 Kali	Rp 80.000.000	APBD		8 Kali	Rp 88.000.000
2.15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kabupaten / Kota	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang memenuhi syarat pemenuhan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Kabupaten Bone	6 Kali	Rp 60.000.000	APBD		6 Kali	Rp 66.000.000
2.15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kebijakan yang diambil dalam mencapai sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum yang baik	Kabupaten Bone	1 Dokumen	Rp 80.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 88.000.000
2.15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota		100%	161.051.000			100%	177.156.100
2.15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan uji coba	Kabupaten Bone	2 Kali	Rp 161.051.000	APBD		2 Kali	Rp 177.156.100
2.15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%	825.000.000			100%	357.500.000
2.15	03	2.13	01	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp 500.000.000	APBD		1 Kegiatan	Rp -
2.15	03	2.13	02	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan sungai dan danau yang terpelihara	Kabupaten Bone	2 Titik	Rp 300.000.000	APBD		3 Titik	Rp 330.000.000
2.15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemasukan PAD di bidang Pelabuhan sungai dan danau yang optimal	Kabupaten Bone	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD		12 Bulan	Rp 27.500.000
JUMLAH								11.239.575.161				11.116.318.744





Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan dibidang Perhubungan sebagai wujud nyata dan tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selama kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bone, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Adapun fungsi dari Renja tahun 2022 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2022, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bona  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.01.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.01.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Totok Ufuk	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										6,539,783,208		15,665,591,591
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,539,783,208		9,229,258,261
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										189,208,000		122,371,300
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang disusun	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,520,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,496,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang terkumpul	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,520,000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilakukan dan dilaksanakan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 persen	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,520,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keberhasilan Kinerja SKPD	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	15,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	46,315,300
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,654,843,240		4,628,312,095
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 persen	3,996,043,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,156,196,095
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	26,200,000
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 persen	50,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	47,916,000
2	15	01	2.03		Administrasi Kapagasaan Perangkat Daerah										0		61,675,212
2	15	01	2.03	09	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 orang	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,575,212
2	15	01	2.03	11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis/non formal	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 orang	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,100,000
2	15	01	2.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah										694,109,879		1,452,588,126
2	15	01	2.04	07	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang disediakan alat tulis kantor (ATK) pembiayaan administrasi pemerintahan sesuai rencana kebutuhan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 persen	43,906,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	75,478,590
2	15	01	2.04	08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang disediakan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 persen	438,720,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	719,518,750
2	15	01	2.04	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang disediakan barang cetakan dan penggandaan pembiayaan administrasi pemerintahan sesuai rencana kebutuhan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 persen	25,872,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	57,860,700
2	15	01	2.04	06	Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Pengisian Perangkat Lunak	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang disediakan bahan baku dan pembiayaan pengisian perangkat lunak sesuai rencana kebutuhan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Bulan	100 persen	11,840,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	30,900,000
2	15	01	2.04	09	Penyediaan Laporan dan Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke instansi lain daerah yang dilakukan oleh aparat perangkat daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 kali	100 persen	179,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	569,726,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.8.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.8.00.8.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode				Uraian/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0			772,119,158		
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan minimal yang tersedia	Cakupan Realisasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 unit	100 persen	9	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	67,630,000
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan ketersediaan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan mebel	Cakupan Realisasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 paket	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	46,119,158
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Cakupan Realisasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 unit	100 persen	9	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	170,300,000
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,527,251,500				1,601,721,380	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program, Teknis Perangkat Daerah	Jumlah layanan listrik, telepon dan waste maintenance sesuai rencana kebutuhan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 paket	100 persen	4,954,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program, Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	43,281,700
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program, Teknis Perangkat Daerah	Jumlah tercapainya tim studi yang menghasilkan jasa keuangan selama setahun	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	184 orang	100 persen	1,481,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program, Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,558,489,680
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								154,178,650				390,421,000	
2	15	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 unit	100 persen	146,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	330,200,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Perawatan dan Kosong Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Rumah	100 persen	4,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	16,500,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 kegiatan	100 persen	3,110,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	41,373,000
2	15	02		PROGRAM PENYELenggaraAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)								0				6,416,333,332	
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								0				10,000,000	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 kebijakan	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	80 %	0,000,000
2	15	02	2.02	Penyediaan Penyelenggaraan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								0				2,175,000,000	
2	15	02	2.02	04	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah pembangunan jalan	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 buah	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	80 %	280,000,000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 paket	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	80 %	1,650,000,000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Perawatan Prasarana Jalan	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah perawatan jalan	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	35 titik	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	80 %	245,000,000
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								0				1,719,615,000	
2	15	02	2.03	01	Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Terminal	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang tersedia serta masyarakat dan pengendara yang terlayani	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	12 Rumah	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	80 %	1,719,615,000
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								0				506,727,232	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Bermotor Berkala Berdasarkan Berkas	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen registrasi kendaraan bermotor	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Pemenuhan Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 Persen	47,623,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Praktisi Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tipek Utkar	Target	
2	15	02	2.05	04	Pengajian Buku Jilid U- Pengaruh Berkala Kerdaraan Bermotor	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen buku jilid up pengaruh berkala kerdaraan bermotor	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 Persen	275.000,000
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kerdaraan Bermotor Way b lu	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kerdaraan bermotor	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 Persen	52.488,700
2	15	02	2.05	07	Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kerdaraan Bermotor	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah sarana alat pengujian keredaraan bermotor yang terdaftar sesuai rencana kebutuhan	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 Persen	88.030,032
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kerdaraan Bermotor	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kerdaraan bermotor	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 kegiatan	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 Persen	50.585,500
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Jalur Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							0				1.550.835,000		
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Penanaman, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Isian dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Jalur Lintas	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah perlempangan isian handy calzone selamati sekolah/ambu- rambu Jalur Lintas marka jalur/guardrail/lemam Bisungapelinator	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	1 paket	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemasangan Rambu-rambu	50 Paket	1.550.835,000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan							0				297.806,800		
2	15	02	2.08	01	Pemeriksaan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang terlatih	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	1 Kegiatan	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemasangan Rambu-rambu	50 Paket	55.000,000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana LLAJ Berkala Kerdaraan Bermotor	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah keselamatan angkutan mobil perusahaan barang yang meningkat	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	8 Kali	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemasangan Rambu-rambu	50 Paket	88.500,000
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pelayanan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kerdaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi syarat pemenuhan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	0 Kali	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemasangan Rambu-rambu	50 Paket	65.000,000
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah sistem keselamatan perusahaan angkutan umum yang terbentuk	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	1 Dokumen	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemasangan Rambu-rambu	50 Paket	88.000,000
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trasek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							0				177.156,100		
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trasek Pedesaan Kabupaten/Kota	Rasiyir Trasek	Jumlah pelaksanaan sosialisas dan uji coba	Persepsi Pemenuhan Cakupan Penyenggaraan Jalur Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kab Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0025 Rasio	2 Kali	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasiyir Trasek	0.0025 Rasio	177.156,100
TOTAL												6.539.783,200					15.645.591,595	